



CALBMN

TAHUNAN (Auditet) TA.2024

STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN

*Untuk Periode yang
Berakhir Tanggal
31 Desember 2024*



Jalan Aki Balak RT 68
Kel.Karang Harapan, Kec
Tarakan Barat Kota Tarakan
Telp / Fax: (0551) 3826321

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BMN dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan ini mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tarakan, 31 Desember 2024
Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan



Johanis J. Medea, S.St.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	1
II DASAR HUKUM.....	2
III SATUAN KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN	6
IV PERIODE LAPORAN	8
V KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	8
VI KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	15
VII PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	20
VIII RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024	22
IX INFORMASI BMN LAINNYA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perubahan Nilai BMN Persediaan, <i>Intrakomptabel</i> , dan <i>Ekstrakomptabel</i> Sebelum Penyusutan dan periode sebelumnya di Stasiun PSDKP Tarakan KKP	22
Tabel 2.	Rincian Mutasi Persediaan di Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Periode Tahunan Tahun 2024 Per 31 Desember 2024	24
Tabel 3.	Rincian Mutasi Persediaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan Tahunan Tahun 2024.....	24
Tabel 4.	Saldo Awal Persediaan Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahunan Tahun 2024 Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan.....	25
Tabel 5.	Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	27
Tabel 6.	Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 .	27
Tabel 7.	Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 .	27
Tabel 8.	Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Hibah Masuk Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 .	29
Tabel 9.	Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Perolehan Lainnya Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024.....	29

Tabel 10. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 .	30
Tabel 11. Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Periode Tahunan Tahun 2024.....	30
Tabel 12. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 .	31
Tabel 13. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Hibah Keluar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 .	31
Tabel 14. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024.....	32
Tabel 15. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penghapusan Lainnya Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	32
Tabel 16. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	33
Tabel 17. Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	33
Tabel 18. Transaksi Opname Fisik Persediaan Per Akun pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Periode Tahunan Tahun 2024...	34
Tabel 19. Mutasi Tambah Tanah Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	34
Tabel 20. Mutasi Kurang Tanah Pada Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	34

Tabel 21. Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024 ..	35
Tabel 22. Rincian Permasalahan BMN berupa Tanah Per 31 Desember 2024.....	35
Tabel 23. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	36
Tabel 24. Mutasi Tambah Alat Besar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	36
Tabel 25. Mutasi Kurang Alat Besar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	37
Tabel 26. Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024.....	37
Tabel 27. Mutasi Tambah Alat Angkutan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	38
Tabel 28. Mutasi Kurang Alat Angkutan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	38
Tabel 29. Alat Angkutan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024.....	40
Tabel 30. Alat Bengkel dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024.....	41
Tabel 31. Alat Pengolahan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	42
Tabel 32. Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	43
Tabel 33. Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	45
Tabel 34. Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	46

Tabel 35. Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 202 ...	46
Tabel 36. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024.....	47
Tabel 37. Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	48
Tabel 38. Mutasi Tambah Alat Persenjataan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	49
Tabel 39. Mutasi Kurang Alat Persenjataan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	50
Tabel 40. Alat Persenjataan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	50
Tabel 41. Mutasi Tambah Alat Komputer Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	51
Tabel 42. Mutasi Kurang Alat Komputer Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	52
Tabel 43. Alat Komputer Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024.....	53
Tabel 44. Alat Eksplorasi Topografi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	54
Tabel 45. Alat SAR Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	55
Tabel 46. Mutasi Tambah Alat Peralatan/Produksi Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	56
Tabel 47. Mutasi Kurang Alat Peralatan/Produksi Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	56
Tabel 48. Alat Peralatan Peralatan/Produksi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024.....	57

Tabel 49. Alat Peralatan Olah Raga Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	58
Tabel 50. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	58
Tabel 51. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	59
Tabel 52. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	59
Tabel 53. Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	60
Tabel 54. Tugu/Tanda Batas Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	61
Tabel 55. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	61
Tabel 56. Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	62
Tabel 57. Irigasi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024 ..	63
.....	
Tabel 58. Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	63
.....	
Tabel 59. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	64
Tabel 60. Bahan Perpustakaan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024	65
Tabel 61. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	66
Tabel 62. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	66
Tabel 63. Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	67

Tabel 64.	Rincian Mutasi Aset Lainnya Mesin Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	69
Tabel 65.	Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Golongan Barang Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	70
Tabel 66.	Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	71
Tabel 67.	Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per Golongan Barang Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	72
Tabel 68.	Mutasi Tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	72
Tabel 69.	Nilai BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	74
Tabel 70.	Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	75
Tabel 71.	Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	76
Tabel 72.	Perkembangan Nilai BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2021-2025 (5 tahun terakhir)	77
Tabel 73.	Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	78
Tabel 74.	Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan per 31 Desember 2024.....	78
Tabel 75.	Ringkasan Pengelolaan BMN <i>Idle</i> Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	80

Tabel 76. Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	82
Tabel 77. Ringkasan BMN Hilang Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024	82
Tabel 78. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2024	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	7
Gambar 2. Visi dan Misi Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	8
Gambar 3. Transformasi Infrastruktur	17
Gambar 4. Transformasi Aplikasi	17
Gambar 5. Strategi Tranformasi	18
Gambar 6. Integrasi Aplikasi Srsuai Dengan <i>One Data System</i>	18
Gambar 7. Capaian Program Satu Data/ <i>One Data System</i> KKP.....	19



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Pada UAKPB Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Periode Tahunan T.A 2024

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu syarat mutlak dalam mewujudkan *good governance* untuk memenuhi konsep responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data BMN dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan aturan turunannya yang mengatur tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Terkait dengan laporan BMN, Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahunan ini merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Direktorat Jenderal PSDKP. Kemudian, LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal PSDKP Triwulan III Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pkoreksi pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali diubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang

- Pelaksanaan Likuidasi Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang tata

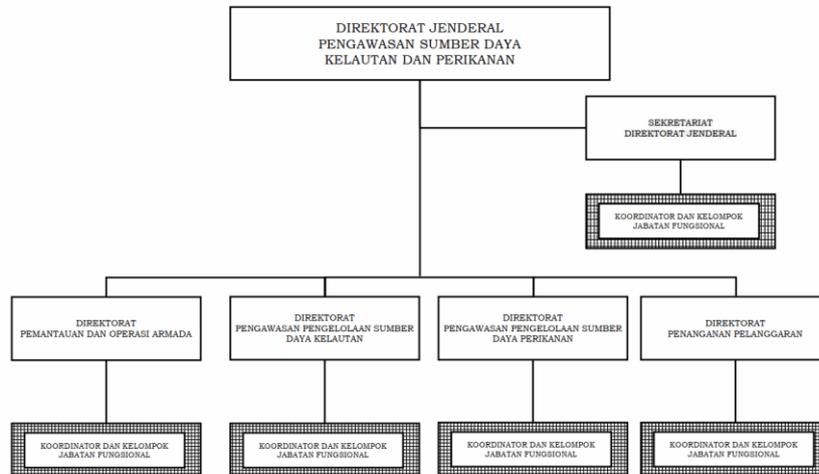
Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;

33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020;
35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara;
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
37. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
38. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK- BMN.

III. SATUAN KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas pokok yaitu sebagai menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan da memiliki Unit Pelaksana Teknis [UPT] yang berada di bawahnya, salah satunya adalah Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Struktur organisasi Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Stasiun PSDKP Tarakan terdiri dari 43 Pegawai Apasatur Sipil Negara dan 29 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun Tugas dan Fungsi dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan bertugas untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;

7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain itu, Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan mempunyai visi dan misi sebagaimana di bawah ini.



Gambar 2. Visi dan Misi Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Kuasa Pengguna Direktorat Jenderal PSDKPTriwulan III Tahun 2024 ini disusun dan disajikan untuk Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka

mencapai kualitas LBKP Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodifikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara.

3. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan

Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

4. Kebijakan Kapitalisasi

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

5. Implementasi Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Aplikasi untuk pelaksanaan penatausahaan BMN yakni Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada.

6. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 *Audited*.

Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.

Kemudian penyusutan reguler Tahunan dijalankan oleh aplikasi per 31 Desember 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Tahunan Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Tahunan Tahun 2013 dan seterusnya.

7. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, *Software*, lisensi, dan waralaba (*franchise*). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

8. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Tahunan Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalankan secara *offline*, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi *online*, yaitu e-Rekon & LK melalui situs <http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id>.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN *online*, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan *upload* saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 31 Desember 2017 (*Audited*), sebagai *base data online* SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. *Upload* saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon & LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal SIMAK-BMN vs. SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi *online* SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data *online* ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon & LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui *upload* data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara *online* dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program 'Satu Data' atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

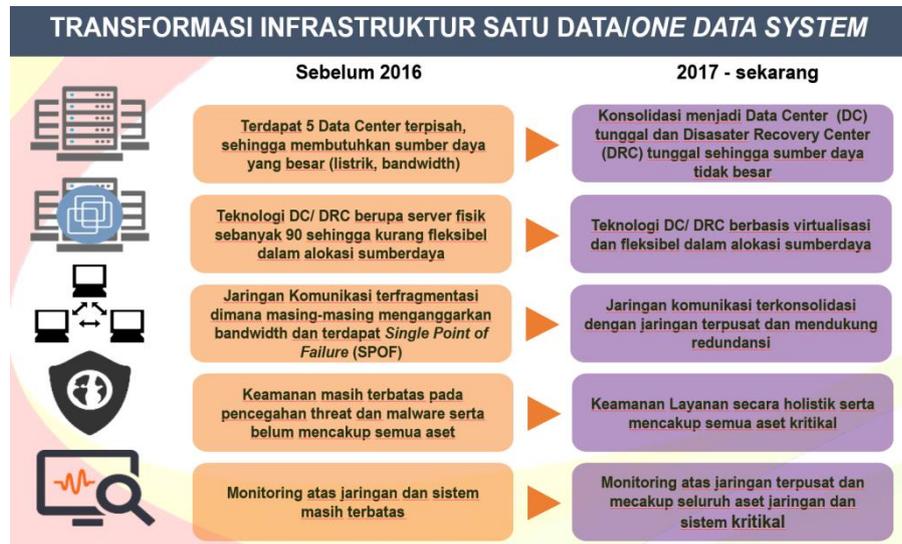
One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan

Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016;
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016;
- 3) Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin;
- 4) Alih Status Sistem Informasi;
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi;
- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi;
- 7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin.

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.



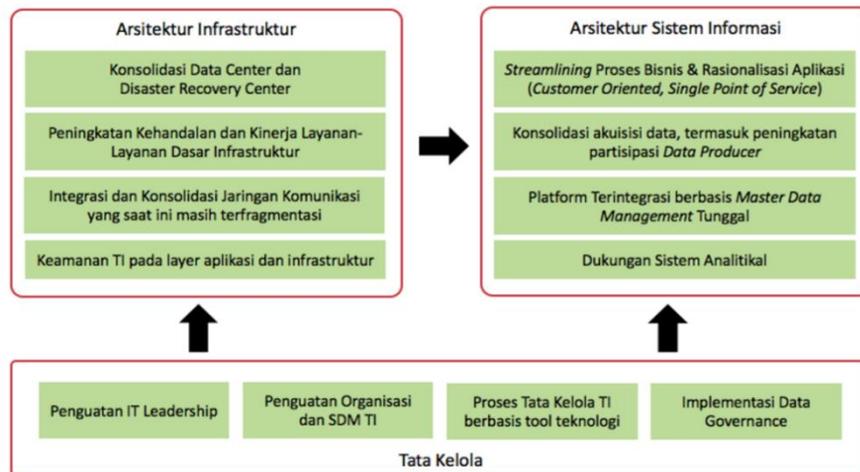
Gambar 3. Transformasi Infrastruktur *One Data System*

TRANSFORMASI APLIKASI

KONDISI APLIKASI SEBELUM DAN SETELAH SATU DATA - 2016	2017 - ...
	SEBELUM ONE DATA	SETELAH ONE DATA
• Master Data	Redundan/ Tidak Konsisten	Tunggal Dan Konsisten
• Basis Pengembangan Aplikasi	Struktur Organisasi	Siklus Fungsional
• Aplikasi Pendataan Produksi	Beberapa Aplikasi	satudata.kkp.go.id
• Jumlah aplikasi	295 Aplikasi	19 Aplikasi Utama
• Keamanan Aplikasi	Belum Terkelola Baik	Terkelola melalui Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara
• Validasi Data Kependudukan	Manual	Validasi E-KTP <i>Online</i> melalui integrasi dengan sistem DUKCAPIL – KEMDAGRI
• Dokumentasi arsitektur aplikasi	Tidak Ada	Terdokumentasi Dengan Baik

Gambar 4. Transformasi Aplikasi

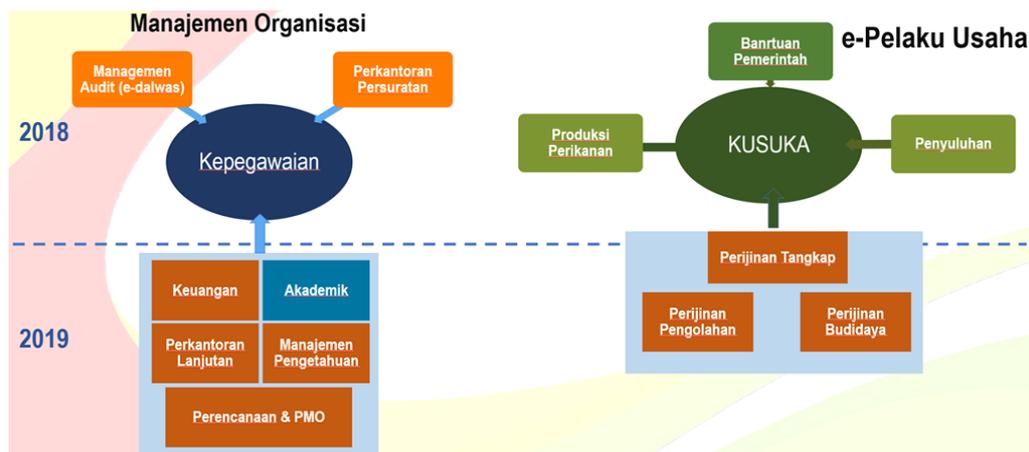
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 5. Strategi Transformasi Teknologi Informasi

Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan;
2. Aplikasi yang berkaitan dengan *Stakeholders* Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).



Gambar 6. Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System



Gambar 7. Capaian Program Satu Data/One Data System KKP

Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka *One Data System* diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen dan diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang

dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet	Beban Non Operasional	XXX
Kredit	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan hingga 31 Desember 2024.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna UAKPB (LBKP) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan ini adalah sebesar Rp40.425.415.647 yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp39.242.798.828 dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp2.109.547.091 serta mutasi kurang sebesar Rp926.930.272. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan

transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar.
2. Daftar Isi.
3. Daftar Gambar.
4. Daftar Tabel.
5. Neraca Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Anggaran 2024, per tanggal 31 Desember 2024.
6. Laporan Barang Persediaan.
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Sub Kelompok Barang.
9. Laporan Aset Tak Berwujud.
10. Laporan Barang Bersejarah.
11. Laporan Kondisi Barang.
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang.
13. Laporan Barang Hilang.
14. Laporan Barang Rusak Berat.
15. Laporan Barang Hibah DK/TP.
16. Catatan atas LBKP.

Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan per tanggal 31 Desember 2024, catatan ringkas mutasi BMN pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN 2024

A. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 1 Januari 2024 sebelum penyusutan menurut Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan adalah sebesar Rp39.242.798.828 yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp39.154.672.503 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp88.126.325.

Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp40.425.415.647 yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp40.312.400.342 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp113.015.305.

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode berjalan, sebesar Rp0 yang terdiri atas nilai BMN *intrakomptabel* sebesar Rp0 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp0.

Perubahan penyajian saldo awal tersebut dapat dalam perubahan nilai BMN Persediaan, BMN *intrakomptabel*, dan BMN *ekstrakomptabel* sebelum penyusutan disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1. Perubahan Nilai BMN Persediaan, *Intrakomptabel*, dan *Ekstrakomptabel* Sebelum Penyusutan dan periode sebelumnya di Stasiun PSDKP Tarakan

Kode	Uraian	Periode 31 Desember 2023 Audited (Rp)	Periode 31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun)	%
NERACA					
	Aset Lancar				
1171	Persediaan	67.237.025	110.279.602	43.042.577	64
	Jumlah Aset Lancar	67.237.025	110.279.602	43.042.577	64
BMN INTRAKOMPTABEL					
	Aset Tetap				
1311	Tanah	4.070.616.000	4.070.616.000	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	23.577.689.333	23.993.365.172	415.675.839	2
1331	Gedung dan Bangunan	10.599.904.600	11.341.956.600	74.052.000	7
1341	Jalanan, jembatan, Irigasi dan Jaringan	906.462.570	906.462.570	0	0

Kode	Uraian	Periode 31 Desember 2023 Audited (Rp)	Periode 31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1351	Aset Tetap Lainnya				
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.991.575	99.991.575	0	0
Jumlah Aset Tetap		39.254.664.078	40.412.391.917	1.157.727.839	7
Aset Lainnya					
1621	Aset Tak Berwujud				
1661	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)				
1661	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah				
Jumlah Aset Lainnya					
BMN EKSTRAKOMPTABEL					
1313	Peralatan dan Mesin	88.126.325	113.015.305	24.888.980	28
1331	Gedung dan Bangunan				
TOTAL BMN EKSTRAKOMPTABEL		88.126.325	113.015.305	24.888.980	28
TOTAL NILAI BMN GABUNGAN		39.410.027.428	40.635.686.824	1.225.659.396	3

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2024

Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp110.279.602 yang terdiri dari saldo awal Rp.67.237.025 dan total mutasi selama Tahunan Tahun 2024 sebesar Rp43.042.577. Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Rincian Mutasi Persediaan di Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Periode Tahunan Tahun 2024 Per 31 Desember 2024

AKUN	Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
521811	Barang Konsumsi	42.106.415	42.513.165	84.619.580
523123	Suku cadang	25.130.160	529.412	25.660.022
Total		67.237.025	43.042.577	110.279.602

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama Tahunan Tahun 2024, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

Tabel 3. Rincian Mutasi Persediaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan Tahunan Tahun 2024

Saldo Awal per 1 Januari 2024 (31 Desember 2023 Audited)	
SALDO AWAL	67.237.025
MUTASI TAMBAH	
M01 Penambahan Saldo Awal	
M02 Pembelian	797.194.987
M03 Transfer Masuk	
M04 Hibah Masuk	
M06 Perolehan Lainnya	
M07 Reklasifikasi Masuk	
MUTASI KURANG	
K01 Pemakaian	(752.535.910)
K02 Tranfer Keluar	
K03 Hibah Keluar	
K04 Barang Usang	
K05 Barang Rusak	
K07 Penghapusan Lainnya	
K08 Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
K09 Penyerahan kepada Masyarakat	
K10 Reklasifikasi Keluar	
P01 Opname Fisik Bertambah	(1.616.500)
KOREKSI PENYESUAIAN PERSEDIAAN	
M99 Koreksi Tambah	
K99 Koreksi Kurang	
SALDO AKHIR	110.279.602

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 1 Januari 2024 merupakan saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*), senilai Rp67.237.025 hasil *stock opname* persediaan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Saldo Awal Persediaan Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahunan Tahun 2024 Menurut Jenis Akun dalam Aplikasi Persediaan

AKUN	URAIAN AKUN	NILAI
521811	Barang Konsumsi	42.106.415
523123	Suku cadang	25.130.610
TOTAL		67.237.025

2) Mutasi Persediaan Tahunan Tahun 2024

Saldo Per 31 Desember 2024 senilai Rp110.279.602 diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai Rp67.237.025 dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 1 Januari–30 Desember 2024.

2.1 Mutasi Tambah pada transaksi persediaan meliputi transaksi

- (1) Penambahan Saldo Awal;
- (2) Pembelian;
- (3) Transfer Masuk;
- (4) Hibah Masuk;
- (5) Perolehan Lainnya;
- (6) Reklasifikasi Masuk;
- (7) Koreksi Tambah.

2.2 Mutasi Kurang pada transaksi persediaan meliputi transaksi

- (1) Pemakaian;
- (2) Transfer Keluar;
- (3) Barang Usang;
- (4) Barang Rusak;
- (5) Penghapusan Lainnya;
- (6) Strategis/ Berjaga-jaga;
- (7) Penyerahan Kepada Masyarakat;
- (8) Reklasifikasi Keluar;
- (9) Koreksi Kurang.

2.3 Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan transaksi yang disebabkan atas penggunaan harga terakhir pembelian dalam aplikasi e-rekon dan transaksi koreksi tambah atau kurang. Penyesuaian berdasarkan hasil

2.4 *stock opname* persediaan merupakan transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan berdasarkan hasil *stock opname* Per 31 Desember 2024.

Nilai persediaan pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan mengalami kenaikan/penurunan senilai Rp43.042.577. Nilai kenaikan/penurunan tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan senilai Rp797.194.987 mutasi kurang senilai Rp752.535.910 dan penyesuaian berdasarkan hasil *stock opname* Per 31 Desember 2024 senilai Rp110.279.602

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan sebesar Rp797.194.987 terdiri atas transaksi mutasi pembelian

sebesar Rp797.194.987 dan penambahan saldo awal sebesar Rp0.

a. M01 – Penambahan Saldo Awal

Transaksi penambahan saldo awal sebesar Rp0,00 Rincian Persediaan per akun atas transaksi penambahan saldo awal adalah :

Tabel 5. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penambahan Saldo Awal Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

Penjelasan rinci atas transaksi tersebut yaitu selama periode 31 Desember 2024 tidak terdapat transaksi Penambahan Saldo Awal (M01) pada Satker Stasiun PSDKP Tarakan.

b. M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama periode 31 Desember 2024 sebesar Rp797.194.987 merupakan transaksi pembelian barang persediaan berupa barang konsumsi dan suku cadang yang terjadi selama periode 31 Desember Tahun 2024.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel 6. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	4.426	212.273.350
523123	Suku Cadang	471	584.921.637
TOTAL		4.897	797.194.987

c. M03 - Transfer Masuk (TM) dan K02 – Transfer Keluar (TK)

TM-TK merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi/satker dalam satu Eselon I maupun antar Eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya. Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Periode Tahunan Tahun 2024 memiliki saldo senilai Rp0.00.

Rincian Persediaan per akun barang atas transaksi TM-TK adalah:

Tabel 7. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi TM-TK Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

Penjelasan rinci atas transaksi tersebut yaitu selama periode 31 Desember 2024 tidak terdapat transaksi Transfer Masuk (M03) dan Transfer Keluar (K02) pada Satker Stasiun PSDKP Tarakan

d. M04 - Hibah Masuk

Transaksi Hibah Masuk selama Tahunan Tahun 2024 senilai Rp0.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Masuk adalah:

Tabel 8. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Hibah Masuk Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

Penjelasan rinci atas transaksi tersebut yaitu selama periode 31 Desember 2024 tidak terdapat transaksi Hibah Masuk (M04) pada satker Stasiun PSDKP Tarakan.

e. M06 – Perolehan Lainnya

Perolehan lainnya selama Tahunan Tahun 2024 senilai Rp0,00.

Rincian Persediaan per Akun atas transaksi Perloehan Lainnya adalah:

Tabel 9. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi Perolehan Lainnya Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

f. M07 - Reklas Masuk (RM) dan K10 – Reklas Keluar (RK)

Saldo Reklas Masuk pada Tahunan Tahun 2024 senilai Rp0,00, sedangkan nilai Reklas Keluar pada periode Tahunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Tidak terdapat selisih antara Reklas Masuk dan Reklas Keluar.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi RM-RK adalah:

Tabel 10. Rincian Persediaan per Akun atas Transaksi RM-RK Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

g. M99 - Koreksi Tambah dan K99 – Koreksi Kurang

Transaksi Koreksi Tambah dan Kurang merupakan koreksi pencatatan transaksi persediaan atas kesalahan pencatatan kuantitas maupun nilai persediaan (lebih/kurang) pada periode sebelumnya. Koreksi tambah selama periode Tahunan Tahun 2024 senilai Rp0,00, sedangkan Koreksi Kurang senilai Rp0,00, dengan rincian per akun sebagai berikut:

Tabel 11. Transaksi Persediaan Per Akun atas transaksi Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Periode Tahunan Tahun 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K10,K99)

a. K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian senilai Rp754.152.410 merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa barang konsumsi untuk kebutuhan kantor dan suku cadang serta perlengkapan speedboat pengawas

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Tabel 12. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
521811	Barang Konsumsi	3.554	169.760.185
523123	Suku Cadang	490	582.775.725
JUMLAH		4.044	752.535.910

b. K03 – Hibah Keluar

Transaksi Hibah Keluar selama periode Tahunan Tahun 2024 senilai Rp0,00. Persediaan dimaksud berupa NIHIL Rincian Persediaan per akun atas transaksi Hibah Keluar adalah:

Tabel 13. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Hibah Keluar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

c. K04 – Barang Usang dan K05 – Barang Rusak

Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode Tahunan Tahun 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 .

Barang usang merupakan:1) barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa; atau 2) barang persediaan berupa hewan tanaman yang mati untuk kegiatan produksi atau penelitian. Sedangkan barang rusak merupakan barang persediaan yang dikeluarkan pencatatannya karena barang persediaan tidak layak untuk digunakan untuk operasional atau diserahkan kepada kelompok masyarakat.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Barang Usang dan Barang Rusak adalah:

Tabel 14. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

d. K06 – Penghapusan Lainnya (diisi jika terdapat transaksi ini)

Transaksi Penghapusan Lainnya sebesar Rp0,00, merupakan transaksi keluarnya barang persediaan karena sebab lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Penghapusan Lainnya adalah:

Tabel 15. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Penghapusan Lainnya Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

e. K08 – Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga yang terjadi selama periode Tahunan Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00. Persediaan yang dimaksud berupa NIHIL.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga adalah:

Tabel 16. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp.0,00 merupakan akumulasi yang berasal dari transaksi harga pembelian terakhir dan koreksi keluar/masuk (atau alasan lainnya). Rincian akumulasi transaksi penyesuaian nilai persediaan disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan Per Akun Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

KODE AKUN	URAIAN AKUN	KUANTITAS	NILAI
521811	Barang Konsumsi	-	-
523123	Suku Cadang	-	-
TOTAL		-	-

IV. Hasil *Opname* Persediaan

Transaksi hasil *opname* fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan Per 31 Desember 2024. Hasil *Opname* Fisik senilai Rp1.616.500 terdiri dari nilai total transaksi Hasil *Opname* Fisik P01 senilai Rp1.616.500 dan Hasil *Opname* Fisik P02 (kurang) senilai Rp0. Besarnya nilai transaksi Hasil *Opname* Fisik berdasarkan akun yang mempengaruhi saldo persediaan per Tahunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Transaksi Opname Fisik Persediaan Per Akun pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Periode Tahunan Tahun 2024

URAIAN		P01 (Hasil Opname Fisik Lebih)	P02 (Hasil Opname Fisik Kurang)	Opname Fisik
521811	Barang Konsumsi	0	0	0
523123	Suku Cadang	1.616.500	0	1.616.500
TOTAL		1.616.500	0	1.616.500

Transaksi *Opname* Fisik Lebih merupakan transaksi dimana pada saat dilakukan *opname* fisik terdapat kuantitas persediaan yang berlebih secara fisik dibandingkan dengan catatan yang terdapat pada kartu *stock opname* persediaan atau catatan berdasarkan aplikasi persediaan.

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.070.616.000. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 4.163 m² dengan nilai sebesar Rp4.070.616.000. Mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Tabel 19. Mutasi Tambah Tanah Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
NIHIL	0

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Tabel 20. Mutasi Kurang Tanah Pada Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
NIHIL	0

Dari jumlah/nilai tanah di atas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp. 0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² nilai sebesar Rp. 0.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Tanah Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	4.163	4.070.616.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, yaitu:

Tabel 22. Rincian Permasalahan BMN berupa Tanah Per 31 Desember 2024

Permasalahan Tanah	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa; Dst	NIHIL	0

Proses sertifikasi tanah senilai Rp102.500.000 telah selesai dengan nomor Sertifikat ABN 309494, 16.05.07.03.4.00023 yang berlokasi di Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.106.380.477 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp23.665.815.658 mutasi

tambah sebesar Rp946.669.955 dan mutasi kurang sebesar Rp506.105.136.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	23.577.689.333	88.126.325	23.665.815.658
Mutasi Tambah	920.004.555	28.654.400	948.658.955
Mutasi Kurang	504.328.716	3.765.420	508.094.136
Saldo Akhir	23.993.365.172	113.015.305	39.683.363.647

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 24. Mutasi Tambah Alat Besar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 25. Mutasi Kurang Alat Besar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo awal	0	0	0
Mutasi Tambah	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo akhir	0	0	0

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0,00 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0,00 dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0,00 unit dengan nilai sebesar Rp 0,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.00.

b. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 27 unit dengan nilai sebesar Rp19.499.372.046. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 29 unit dengan nilai sebesar Rp19.130.874.806, mutasi tambah jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar Rp612.070.500 dan mutasi kurang jumlah 5 unit dengan nilai sebesar Rp243.573.260.

Mutasi tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Tabel 27. Mutasi Tambah Alat Angkutan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Pembelian Sepeda Motor	19.250.000	0	19.250.000
Pembelian Kursi Roda	1.720.500	0	1.720.500
Pembelian PPC seabee (Rubber Boat Kapal Hiu 07)	69.000.000	0	69.000.000
Koreksi Perubahan Nilai Bertambah Kapal Patroli Pantai	453.100.000	0	453.100.000
Pengembangan Melalui KDP	69.000.000	0	69.000.000
Total	612.070.500	0	612.070.500

Penjelasan mutasi tambah alat Angkutan periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- Telah terjadi Mutasi Tambah berupa Pengadaan PPC SEABEE (Rubber Boat Kapal Hiu 07) senilai Rp69.000.000 dengan nomor kontrak B.316/PSDKPSta.5/PL.420.2/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- Telah terjadi Mutasi Tambah pengadaan Repowering Speedboat PSDKP Dolphin 017 dengan nilai mutasi tambah

sebesar Rp453.100.000 dengan Nomor Kontrak B.869/PSDKPSta.5/PL.420/III/2024 Tanggal 7 Maret 2024

- Terdapat mutasi tambah berupa pengembangan melalui KDP (speedboat motor tempel) senilai Rp69.000.000 dengan nomor B.1736/PSDKPSta.5/TU.210/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- Telah terjadi Mutasi Tambah pengadaan Sepeda Motor dengan nilai mutasi tambah sebesar Rp19.250.000 dengan Nomor Kontrak B.2152/PSDKPSta.5/PL.420/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024
- Telah terjadi Mutasi Tambah pengadaan Kursi roda dengan nilai mutasi tambah sebesar Rp1.720.500 dengan Nomor Kontrak B.1678/PSDKPSta.5/PL.430/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024.

Mutasi kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Tabel 28. Mutasi Kurang Alat Angkutan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Koreksi pencatatan speedboat/motor tempel	69.000.000	0	69.000.000
Penghentian aset dari penggunaan	174.573.260		174.573.260
TOTAL	243.573.260	0	243.573.260

- Terdapat mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan yakni:
 1. Penghentian aset dari penggunaan berupa Sepeda Motor senilai Rp18.289.130 dengan nomor kontrak B.838/PSDKPSta.5/PL.710/III/2024 tanggal 06 Maret 2024.

2. Penghentian aset dari penggunaan berupa usulan penghapusan Sepeda Motor senilai Rp18.289.130 dengan nomor kontrak B.2251/PSDKPSta.5/PL.710/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
 3. Penghentian aset dari penggunaan Sekoci Motor Tempel senilai Rp57.695.000 dengan nomor SK 1278/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
 4. Terdapat mutasi kurang berupa penghapusan perahu Karet senilai Rp80.300.000 dengan nomor SK 1278/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
- Terdapat mutasi kurang berupa speedboat motor tempel senilai Rp69.000.000, dengan koreksi pencatatan pada aset, nomor B.1736/PSDKPSta.5/TU.210/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Keterangan Koreksi Pencatatan Aset tetap.

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp36.578.260.

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Alat Angkutan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	27	19.499.371.446
Rusak Ringan		
Rusak Berat	2	36.878.260

Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 2,00 unit dengan nilai sebesar Rp36.878.260

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.887.152.497.

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp89.854.460, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 29 unit dengan nilai sebesar Rp89.854.460 mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0. Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Alat Bengkel dan Alat Ukur Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	29	89.854.460
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp75.473.522

d. Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.500.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 5 unit dengan nilai sebesar Rp16.500.000, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 31. Alat Pengolahan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2024**

Uraian Kondisi	Kuantitas (UNIT)	Nilai (Rp)
Baik	5	16.500.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Pengolahan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.437.500.

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.922.056.270, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan

total jumlah barang sebesar 475 unit dengan nilai sebesar Rp1.810.253.960, mutasi tambah jumlah barang 83 unit dengan nilai sebesar Rp188.183.480 dan mutasi kurang jumlah 41 unit dengan nilai sebesar Rp76.381.170.

Mutasi tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Tabel 32. Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Pembelian	159.529.080	28.654.400	188.183.480
Reklasifikasi Masuk	1.989.000	0	1.989.000
TOTAL	159.529.080	28.654.400	188.183.480

Penjelasan mutasi tambah alat Kantor dan Rumah Tangga periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa kulkas sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp7.104.000 dengan B.2937/PSDKPSta.5/PL.420/XI/2024 Tanggal 11 November 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa mesin cuci sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp6.826.500 dengan nomor kontrak B.2937/PSDKPSta.5/PL.420/XI/2024 Tanggal 11 November 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa sofa sebanyak 3 unit dengan Nilai Rp16.983.000 dengan Nomor Kontrak B.1678/PSDKPSta.5/PL.430/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa kasur/springbed sebanyak 12 unit dengan Nilai Rp12.174.480 dengan nomor kontrak B.2174/PSDKPSta.5/PL.420.2/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa meubelair lainnya sebanyak 3 unit dengan Nilai Rp10.323.000 dengan Nomor Kontrak B.518/PSDKPSta.5/PL.420.2/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa A.C Split sebanyak 7 unit dengan Nilai Rp39.804.600 dengan Nomor Kontrak B.1678/PSDKPSta.5/PL.430/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa lemari kayu sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp3.940.500 dengan Nomor Kontrak B.1678/PSDKPSta.5/PL.430/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa dispenser sebanyak 2 unit dengan Nilai Rp5.883.000 dengan Nomor Kontrak B.1678/PSDKPSta.5/PL.430/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa meja kerja kayu sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp34.743.000 dengan Nomor Kontrak B.1678/PSDKPSta.5/PL.430/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa mesin pemotong rumput sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp1.721.170 dengan nomor invoice 5Q.2.20241130.83 tanggal 30 November 2024.
- Telah terjadi reklasifikasi masuk barang berupa alat pembersih lainnya sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp1.989.000 dengan dengan nomor surat B.3241/PSDKPSta.5/PL.760/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.

Mutasi kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Tabel 33. Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	74.660.000	1.721.170	76.381.170
TOTAL	74.660.000	1.721.170	76.381.170

Terdapat mutasi kurang alat Kantor dan Rumah Tangga berupa penghentian aset dari penggunaan dengan nomor SK 1278/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 NUP Mesin penghitung uang senilai Rp4.235.000
- 2 NUP Meja kerja kayu senilai Rp5.500.000
- 29 NUP Kursi besi/metal senilai Rp27.899.170
- 1 NUP Mesin penghisap debu/vacuum cleaner senilai Rp1.870.000
- 2 NUP lemari es senilai Rp7.475.000
- 5 NUP A.C Split senilai Rp26.412.000
- 1 NUP Handy cam senilai Rp2.990.000

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	510	1.793.546.465
Rusak Ringan		
Rusak Berat	41	76.381.170

Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 41,00 unit dengan nilai sebesar Rp. 76.381.170.

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.465.736.998.

f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp720.608.280, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 76 unit dengan nilai sebesar Rp771.374.530, mutasi tambah jumlah 0 barang dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp.50.766.250.

Mutasi kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Tabel 35. Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	50.472.000	294.250	50.766.250
TOTAL	50.472.000	294.250	50.766.250

Terdapat mutasi kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berupa penghentian aset dari penggunaan dengan nomor SK 1278/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 5 NUP *Uninterruptible Power Supply* (UPS) senilai Rp1.834.250
- 1 NUP camera digital senilai Rp4.940.000
- 1 NUP mesin kertas senilai 4.015.000
- 2 NUP facsimile senilai Rp3.950.000
- 1 NUP alat komunikasi radio Ssb lainnya senilai Rp26.290.000
- 1 NUP alat komunikasi radio VHF lainnya senilai Rp2.750.000
- 2 NUP *Finger Printer time and attendance acces control system* senilai Rp6.987.000

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp50.766.250.

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	63	720.608.280
Rusak Ringan		
Rusak Berat	13	50.766.250

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp 50.766.250

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp481.710.485.

g. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.032.000 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 15 unit dengan nilai sebesar Rp13.032.000 mutasi tambah jumlah barang 0 unit senilai Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit senilai Rp0

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 37. Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2024**

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	15	13.032.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.731.670.

h. Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp99.360.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 15 unit dengan nilai sebesar Rp86.150.000, mutasi tambah jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp14.960.000 dan mutasi kurang jumlah 14 unit dengan nilai sebesar Rp1.750.000.

Mutasi tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Tabel 38. Mutasi Tambah Alat Persenjataan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Pembelian	14.960.000	0,00	14.960.000
Total	14.960.000	0,00	14.960.000

Penjelasan mutasi tambah alat persenjataan periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa GPS sebanyak 2 unit dengan Nilai Rp14.960.000 dengan B.1032/PSDKPSta.5/PL.420/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024.

Mutasi kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Tabel 39. Mutasi Kurang Alat Persenjataan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	0,00	1.750.000	1.750.000
TOTAL	0,00	1.750.000	1.750.000

Terdapat mutasi kurang Alat Persenjataan berupa penghentian aset dari penggunaan dengan nomor SK 1278/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 14 NUP Pakaian pelindung senilai Rp1.750.000

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Alat Persenjataan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	3	99.360.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 14 unit dengan nilai sebesar Rp1.750.000

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp86.270.000.

i. Alat komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.003.260.721, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 140 unit dengan nilai sebesar Rp1.005.439.202, mutasi tambah jumlah barang 11 unit dengan nilai sebesar Rp131.455.975 dan mutasi kurang jumlah 33 unit dengan nilai sebesar Rp133.634.456.

Mutasi tambah Alat Komputer tersebut meliputi:

Tabel 41. Mutasi Tambah Alat Komputer Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Pembelian	119.542.975	0	119.542.975
Transfer Masuk	11.913.000	0	11.913.000
Total	131.455.975	0	131.455.975

Penjelasan mutasi tambah alat Komputer periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- Telah terjadi mutasi tambah pembelian berupa printer sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp5.352.975 sesuai dengan nomor kontrak B.2174/PSDKPSta.5/PL.420/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa Tablet PC sebanyak 4 unit dengan Nilai Rp36.690.000 sesuai dengan nomor kontrak B.565/PSDKPSta.5/PL.420.2/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 (3 unit) dan nomor kontrak B.2937/PSDKPSta.5/PL.420/XI/2024 tanggal 11 November

2024 dan nomor kontrak B.2937/PSDKPSta.5/PL.420/XI/2024 Tanggal 11 November 2024 (1 unit).

- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa Lap top sebanyak 5 unit dengan Nilai Rp77.500.000 sesuai dengan nomor kontrak B.565/PSDKPSta.5/PL.420/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
- Telah terjadi mutasi tambah Transfer masuk barang berupa Lap top sebanyak 1 unit senilai Rp11.913.000 sesuai dengan nomor BAST B.1105/PSDKPLan.3/PL.450/IV/2024 tanggal 18 April 2024.

Mutasi kurang Alat Komputer tersebut meliputi:

Tabel 42. Mutasi Kurang Alat Komputer Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Transfer Keluar	16.280.000	0	16.280.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan	117.354.456	0	117.354.456
TOTAL	133.634.456	0	133.634.456

- Telah terjadi mutasi kurang Transfer keluar barang berupa Lap top sebanyak 1 unit senilai Rp16.280.000 sesuai dengan nomor BAST B.1105/PSDKPLan.3/PL.450/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
- Terdapat mutasi kurang Alat komputer berupa penghentian aset dari penggunaan dengan nomor SK 1278/KEPMEN-KP/PL.750/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 1. 8 NUP P.C unit senilai Rp57.328.000
 2. 2 NUP Lap top senilai Rp14.245.260
 3. 1 NUP Tablet PC senilai Rp6.919.200

4. 21 NUP Printer (peralatan personal komputer) senilai
 Rp38.857.896

Dari jumlah Alat Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0

Dari jumlah Alat Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 43. Alat Komputer Berdasarkan Status Kondisinya
 Per 31 Desember 2024**

Uraian Kondisi	Kuantitas (UNIT)	Nilai (Rp)
Baik	118	1.003.260.721
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 33 unit dengan nilai sebesar Rp133.634.456.

Akumulasi Penyusutan Alat Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp768.730.008.

j. Alat Eksplorasi Topografi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi Topografi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.820.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp17.820.000, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Eksplorasi Topografi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Eksplorasi Topografi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Alat Eksplorasi Topografi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	17.820.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Eksplorasi Topografi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.583.000.

k. Alat SAR (3.15)

Saldo Alat SAR pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp590.916.700, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 16 unit dengan nilai sebesar Rp590.916.700, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat SAR di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat SAR di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 45. Alat SAR Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2024**

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	14	590.916.700
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat SAR yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0,00 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Alat SAR pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp510.682.575.

I. Unit Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp121.280.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 4 unit dengan nilai Rp121.280.000, mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.989.000 dan mutasi kurang jumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.989.000.

Mutasi tambah Alat Peralatan/Produksi tersebut meliputi:

Tabel 46. Mutasi Tambah Alat Peralatan/Produksi Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Pembelian	1.989.000	0	1.989.000
TOTAL	1.989.000	0	1.989.000

Penjelasan mutasi tambah kurang alat Komputer periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- Telah terjadi mutasi tambah pembelian barang berupa Jet Pump. Dengan jumlah barang sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp1.989.000 dengan nomor surat koreksi: B.3241/PSDKPSta.5/PL.760/XII/2024

Mutasi kurang Alat Peralatan/Produksi tersebut meliputi:

Tabel 47. Mutasi Kurang Alat Peralatan/Produksi Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Reklasifikasi Keluar	1.989.000	0	1.989.000
TOTAL	1.989.000	0	1.989.000

Penjelasan mutasi tambah kurang alat Peralatan/Produksi periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- Telah terjadi mutasi kurang berupa koreksi pencatatan kodesifikasi barang yaitu jet pump menjadi alat pembersih lainnya Dengan jumlah barang sebanyak 1 unit dengan Nilai Rp1.989.000 dengan nomor surat: B.3241/PSDKPSta.5/PL.760/XII/2024

Tabel 48. Alat Peralatan Peralatan/Produksi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	4	121.280.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Dari jumlah Alat Peralatan/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0,00unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan/Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp103.460.000.

m. Alat Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Alat Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.320.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp12.320.000, mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang jumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0,00unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Alat Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 49. Alat Peralatan Olah Raga Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2024**

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	12.320.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Alat Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.320.000.

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.341.956.600, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 17 Unit dengan nilai sebesar Rp10.599.904.600, mutasi tambah sejumlah 1 Unit dengan nilai sebesar Rp742.052.000, dan mutasi kurang sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 50. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Satuan Kerja
Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	10.599.904.600	0	10.599.904.600
Mutasi Tambah	742.052.000	0	742.052.000
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	11.341.956.600	0	11.341.956.600

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.500.131.122, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 13 Unit dengan nilai sebesar Rp9.758.079.122, mutasi tambah sejumlah 1 Unit dengan nilai sebesar Rp742.052.000 dan mutasi kurang sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0.

Mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 51. Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	742.052.000	0	742.052.000
Total	742.052.000	0	742.052.000

- Telah terjadi Mutasi kurang KDP menjadi aset berupa pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan dengan nilai Rp742.052.000

Mutasi kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 52. Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
NIHIL	0	0	0

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 53. Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2024**

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	14	10.500.131.122
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.041.442.844.

b. Tugu/Tanda Batas (4.04.01)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp841.825.478, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 4 Unit dengan nilai sebesar Rp841.825.478, mutasi tambah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 54. Tugu/Tanda Batas Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	4	841.825.478
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tugu/ Tanda Batas yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Tugu/ Tanda Batas pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp108.857.384.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp602.037.670, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp602.037.670, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 55. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	602.037.670	0	602.037.670
Mutasi Tambah	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	602.037.670	0	602.037.670

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp660.287.495, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 427 m² dengan nilai sebesar Rp660.287.495, mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0 sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Jalan dan Jembatan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	427	660.287.495
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp297.209.629.

b. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp149.675.000, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 427 m² dengan nilai sebesar Rp149.675.000, mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Irigasi Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	149.675.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0,00 m² dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp112.256.250.

c. Jaringan (5.03)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp96.500.075, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 2 Unit dengan nilai sebesar Rp96.500.075, mutasi tambah sejumlah 0 Unit dengan nilai

sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	96.500.075
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.662.502.

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada **Laporan Barang Kuasa Pengguna** Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	0	0	0
Mutasi Tambah	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	0	0	0

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp0.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Bahan Perpustakaan Berdasarkan Status Kondisinya Per 31 Desember 2024

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah NIHIL dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp99.991.575, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp176.632.575, mutasi tambah sebesar Rp1.618.862.000 dan mutasi kurang sebesar Rp500.351.000.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Tabel 61. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Saldo Awal	176.632.575
Mutasi Tambah	1.618.862.000
Mutasi Kurang	1.695.503.000
Saldo Akhir	99.991.575

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Tabel 62. Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Perolehan KDP	943.756.320	0	943.756.320
Pengembangan KDP	251.395.680	0	251.395.680
Koreksi Pencatatan KDP	423.710.000	0	423.710.000
TOTAL	1.618.862.000	0	1.618.862.000

Tabel 63. Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
PENGHAPUSAN KDP	76.641.000	0	76.641.000
Koreksi Pencatatan KDP	423.710.000	0	423.710.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	74.052.000	0	74.052.000
TOTAL	1.695.503.000	0	1.695.503.000

KDP yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sudah proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah 1 unit dengan nilai sebesar Rp76.641.000.

Penjelasan Tambahan Terkait KDP Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan:

- Terdapat transaksi perolehan/penambahan KDP berupa:
 1. Terdapat KDP dengan nilai Rp66.946.320 merupakan pengadaan perencanaan pembangunan pos pengawasan Wilayah Kerja SDKP Derawan yang telah dibayarkan 80% dari nilai kontrak sebesar Rp83.682.900 sesuai dengan SPK Nomor: B.1188/PSDKPSta.5/PL.430/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan nomor BAP B.1559/PSDKPSta.5/PL.430/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024
 2. Telah terjadi mutasi tambah perolehan atau penambahan KDP berupa pengadaan repowering SB. DOLPHIN 017 sesuai kontrak NO. B869/PSDKPSta.5/PL.420/III/2024 TGL 07-03-2024 Dengan nilai Rp453.100.000.
 3. Telah terjadi mutasi tambah KDP Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan berupa koreksi pencatatan tambah nilai sesuai dengan nomor kontrak

- B.1188/PSDKPSta.5/PL.430/IV /2024 tanggal 07 Juni 2024 dengan nilai Rp173.400.000
4. Telah terjadi mutasi tambah KDP Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan berupa koreksi pencatatan tambah nilai sesuai dengan nomor kontrak B.1991/PSDKPSta.5/PW.330/VII/2024 dan nomor BAP B.2833/PSDKPSta.5/PL.450/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dengan nilai Rp250.310.000
- Terdapat transaksi pengembangan KDP berupa:
 1. Telah terjadi mutasi tambah KDP Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan berupa pengembangan KDP dengan nomor surat nilai Rp181.590.000 dengan nomor BAP B.3159/PSDKPSta.5/PL.450/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024
 2. Telah terjadi mutasi tambah KDP Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan berupa pengembangan KDP sesuai nomor kontrak B.1188/PSDKPSta.5/PL.430/IV/2024 dan nomor BAP B.3156/PSDKPSta.5/PL.450/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 dengan nilai Rp16.736.580
 3. Telah terjadi mutasi tambah KDP Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan berupa pengembangan KDP sesuai nomor kontrak B.1975/PSDKPSta.5/PL.430/VII/2024 dan nomor BAP B.3162/PSDKPSta.5/PL.450/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 dengan nilai Rp53.069.100
 - Telah terjadi mutasi tambah berupa koreksi pencatatan tambah nilai KDP senilai Rp423.710.000 yang terdiri dari:
 1. Koreksi pencatatan tambah nilai Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan berupa koreksi pencatatan tambah nilai senilai Rp173.400.000 sesuai nomor kontrak

B.2044/PSDKPSta.5/PL.450/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024.

2. Koreksi pencatatan tambah nilai Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan berupa koreksi pencatatan tambah nilai senilai Rp250.310.000 sesuai nomor kontrak B.2823/PSDKPSta.5/PL.450/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024
 - Telah terjadi Mutasi kurang KDP menjadi aset berupa pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Wilker PSDKP Derawan dengan nilai Rp742.052.000
 - Telah terjadi Mutasi kurang reklasifikasi KDP menjadi barang jadi berupa pengadaan repowering SB. DOLPHIN 017 sesuai kontrak NO. B869/PSDKPSta.5/PL.420/III/2024 TGL 07-03-2024 Dengan nilai Rp453.100.000.

8. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah. Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian Mutasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Rincian Mutasi Aset Lainnya Mesin Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	0	0	0
Mutasi Tambah	0	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0
Saldo Akhir	0	0	0

a. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per Golongan Barang Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

GOLONGAN BARANG	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
JUMLAH	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp. 0,00, mutasi tambah sebesar Rp. 0,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,00.

Rincian jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan antara lain:

**Tabel 66. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja
Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024**

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
162151	Software	0	0
162161	Lisensi	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
Total		0	0

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sejumlah NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp0.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

c. BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0, mutasi tambah sebesar 102 unit senilai Rp0 dan mutasi kurang sebesar 0 unit senilai Rp0

Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per Golongan Barang Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp)	
	Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan. Jembatan. Irigasi. dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Mutasi tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Tabel 68. Mutasi Tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya (188)	398.770.586	3.765.420	402.536.006

Penjelasan mutasi tambah BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Penghentian penggunaan lalu dilanjutkan dengan pencatatan barang yang akan dihapuskan peralatan dan mesin sebanyak 102 NUP senilai Rp384.246.876 sesuai dengan surat usulan penghapusan nomor: B.1234/PSDKP.1/PL.750/IV/2024 tanggal 25 April 2024.

- Penghentian penggunaan lalu dilanjutkan dengan pencatatan barang yang akan dihapuskan peralatan dan mesin sebanyak 1 NUP senilai Rp18.289.130 sesuai surat permohonan: B.2251/PSDKPSta.5/PL.710/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024

Akumulasi Penyusutan BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.425.415.647, nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 69. Nilai BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan
Per 31 Desember 2024**

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	110.279.602		0		110.279.602	
	Sub Jumlah (I)	110.279.602		0		110.279.602	
II	Aset Tetap						
1	Tanah	4.070.616.000		0		4.070.616.000	
2	Peralatan dan Mesin	23.993.365.172		113.015.305		24.106.380.477	
3	Gedung dan Bangunan	11.341.956.600		0		11.341.956.600	
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	809.962.495		0		809.962.495	
5	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	99.991.575		0		99.991.575	
	Sub Jumlah (II)	40.315.891.842		113.015.305		40.428.907.147	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
2	Aset Tak Berwujud	0		0		0	
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0		0		0	
	Sub Jumlah (III)	0		0		0	
	TOTAL	40.315.891.842		113.015.305		40.428.907.147	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 per perkiraan Neraca sebagai berikut:

Tabel 70. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

No	Uraian Neraca	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Akum. Penyusutan periode ini (Rp)	Nilai Buku Per 31 Desember 2024 (Rp)
I	Aset Lancar			
	Persediaan	110.279.602	0	110.279.602
	Sub Jumlah (I)	110.279.602	0	110.279.602
II	Aset Tetap			
1	Tanah	4.070.616.000	0	4.070.616.000
2	Peralatan dan Mesin	24.106.380.477	18.423.288.255	5.683.092.222
3	Gedung dan Bangunan	11.341.956.600	1.150.300.228	9.449.604.372
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	809.962.495	409.465.879	400.496.616
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	99.991.575	0	99.991.575
	Sub Jumlah (II)	40.428.907.147	19.983.054.362	19.677.891.285
III	Aset Lainnya			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tak Berwujud			
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan			
	Sub Jumlah (III)	0	0	0
	Total	40.539.186.749	19.983.054.362	19.906.733.080

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 71. Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	110.279.602	110.279.602	0
2	Tanah	4.070.616.000	4.070.616.000	0
3	Peralatan dan Mesin	23.993.365.172	23.993.365.172	0
4	Gedung dan Bangunan	11.341.956.600	11.341.956.600	0
5	Jalan dan Jembatan	660.287.495	660.287.495	0
6	Irigasi	149.675.000	149.675.000	0
7	Jaringan	96.500.075	96.500.075	0
8	Aset Tetap Renovasi			
9	Aset Tetap Lainnya			
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	99.991.575	99.991.575	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.352.805.635)	(18.352.805.635)	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.150.300.228)	(1.150.300.228)	0
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(297.209.629)	(297.209.629)	0
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(112.256.250)	(112.256.250)	0
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.662.502)	(3.662.502)	0
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
18	Hak Cipta			
19	Paten			
20	Software			
21	Lisensi			
22	Hasil Kajian/Penelitian			
23	Aset Tak Berwujud Lainnya			
24	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
25	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan			
26	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional			

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
27	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan			
29	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta			
30	Akumulasi Amortisasi Paten			
31	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>			
32	Akumulasi Amortisasi Lisensi			
33	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak			
Total		20.506.445.700	20.506.445.700	0

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*) selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 72. Perkembangan Nilai BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2021-2025 (5 tahun terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2020	34.037.978.761	4.099.600.330	12,044%
2	2021	34.510.756.912	549.519.151	1,59%
3	2022	39.242.798.828	4.316.960.065	12 %
4	2023	39.893.655.628	650.856.800	2 %
5	2024	40.425.415.647	531.760.019	1 %

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	4.070.616.000	
2	Gedung dan Bangunan	10.749.579.600	742.052.000
3	Selain tanah dan Bangunan	23.460.314.359	800.179.555
TOTAL		38.280.509.959	1.542.231.555

b. Pengelolaan BMN

Tabel 74. Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan per 31 Desember 2024

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang	354.529.400				354.529.400
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang			36.578.260		36.578.260
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna	4.057.276.658			460.887.867	4.518.164.525
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					
TOTAL		4.411.806.058		36.578.260	384.246.867	4.832.631.185

Penjelasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Penggunaan berupa usulan penetapan status penggunaan BMN dalam proses pengajuan surat ke pengguna barang sejumlah 59 unit peralatan dan mesin senilai Rp335.279.400 dengan nomor

usulan permohonan: B.2338/PSDKPSta.5/PL.710/VIII/2024
tanggal 29 Agustus 2024

- Penggunaan berupa usulan penetapan status penggunaan BMN dalam proses pengajuan surat ke pengguna barang sejumlah 1 unit sepeda motor senilai Rp19.250.000 dengan nomor usulan permohonan: B.2324/PSDKPSta.5/PL.710/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024
- Penggunaan berupa usulan penetapan status penggunaan BMN Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna sejumlah 1 unit speedboat/motor tempel (Albacore 03) senilai Rp4.057.276.658 sesuai SK nomor: 13/KM.6/KNL.1303/2024 tanggal 27 Februari 2024
- Pemanfaatan berupa usulan penghapusan Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang sejumlah 1 unit senilai Rp18.289.130 sesuai surat permohonan: B.838/PSDKPSta.5/PL.710/III/2024 tanggal 06 Maret 2024
- Pemanfaatan berupa usulan penghapusan Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang sejumlah 1 unit senilai Rp18.289.130 sesuai surat permohonan: B.2251/PSDKPSta.5/PL.710/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024
- Penghapusan berupa usulan penghapusan Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna sejumlah 102 unit senilai Rp384.246.867 sesuai SK nomor: 1278/KEPMEN-KP/PL.750/XI2024 tanggal 22 November 2024
- Penghapusan berupa usulan penghapusan Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna sejumlah 1 unit Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp76.641.000 sesuai SK nomor: 810/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tanggal 22 November 2024

c. Pemanfaatan pinjam pakai lahan

Terkait dengan pemanfaatan pinjam pakai lahan oleh Stasiun PSDKP Tarakan yakni:

1. Pinjam pakai berupa tanah milik Pemerintah Daerah Nunukan
Terkait dengan status pinjam pakai tanah milik Pemda Nunukan yang dimanfaatkan sebagai gedung kantor wilker Nunukan Utara statusnya berlaku hingga 23 Desember 2024 sesuai dengan nomor surat 10/PKS-DJPSDKP/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019
2. Pinjam Pakai Barang Milik Pelabuhan Perikanan Banjarmasin
Terkait dengan status pinjam pakai barang milik pelabuhan perikanan Banjarmasin yang dimanfaatkan sebagai gedung kantor Satwas Banjarmasin statusnya masih berlaku hingga 03 November 2025 sesuai dengan nomor surat 523.43/221.2-TU/PP-BJM tanggal 30 November 2020.
3. Pinjam Pakai Tanah Di Pangkalan Pendaratan Ikan Batulicin
Terkait dengan status pinjam pakai Tanah Di Pangkalan Pendaratan Ikan Batulicin yang dimanfaatkan sebagai gedung kantor Wilker Batulicin statusnya masih berlaku hingga 09 Juli 2028 sesuai dengan nomor surat B.3919/PSDKP.1/PL.450/VII/2023 tanggal 09 Juli 2023.
4. Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kotabaru
Terkait dengan status pinjam pakai Bangunan Gedung Kantor Pemda Kotabaru yang dimanfaatkan sebagai gedung kantor Wilker Kotabaru statusnya masih berlaku hingga 10 Juli 2028 sesuai dengan nomor surat 01/PSDKP/KKP/PKS/2011 tanggal 10 Juli 2023

d. **Pengelolaan BMN *Idle* (diisi jika memiliki BMN *Idle*)**

Tabel 75. Ringkasan Pengelolaan BMN *Idle* Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Uraian	
Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	
Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	
Selesai serah terima kepada Pengelola	

3. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar BMN Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.578.260. BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat usulan penghapusan dengan nomor B.838/PSDKPSta.5/PL.710/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 sejumlah 1 NUP senilai Rp18.289.230 berupa sepeda motor dengan NUP 2.
- b. Terdapat usulan penghapusan dengan nomor B.2251/PSDKPSta.5/PL.710/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sejumlah 1 NUP senilai Rp18.289.230 berupa sepeda motor dengan NUP 6.

Tabel 76. Ringkasan BMN Rusak Berat Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan
Usulan ke Pengelola	36.578.260
TOTAL	36.578.260

b. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Jumlah tersebut terdiri atas BMN *Intrakomptabel* sebesar Rp0 dan BMN *Ekstrakomptabel* sebesar Rp0. BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77. Ringkasan BMN Hilang Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024

Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
NIHIL	NIHIL	NIHIL
TOTAL		

4. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 78. Ringkasan BMN berupa Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2024

Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan
Sepeda Motor	1	18.289.130
Sepeda Motor	1	18.289.130
Total	2	36.578.260

5. BMN Berupa Aset Tetap yang dinyatakan Hilang.

Tidak terdapat BMN yang dinyatakan hilang pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Per 31 Desember 2024.

6. Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2021

Sesuai dengan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 dengan Nomor 10b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 27 Mei 2023, Stasiun PSDKP Tarakan terdapat beberapa temuan antara lain :

- a. Pencatatan Aset Tetap dalam Aplikasi SIMAN tidak mencantumkan informasi lokasi/Alamat yang jelas. Dengan hasil telah ditindaklanjuti dengan melengkapi informasi lokasi/alamat pada Kartu Identitas Barang (KIB).
- b. Bangunan yang dicatat dalam Aplikasi SIMAN belum didukung dengan bukti Kepemilikan yang sah. Dengan hasil telah ditindaklanjuti dengan dokumen kepemilikan berupa SPTJM. Namun masih terdapat aset yang dalam tindaklanjuti berupa :
 - Bangunan gedung sebanyak 10 NUP telah memiliki sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Bangunan gedung sebanyak 2 NUP telah memiliki surat perjanjian kerja sama yang masih berlaku
 - Bangunan gedung sebanyak 1 NUP masih memerlukan PBG/IMB dalam proses pengurusan ke PTSP

7. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Permasalahan Terkait Hibah Lahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pengadaan Masterplan Pos Pengawasan Kotabaru

Terkait penyelesaian proses hibah lahan dikarenakan tanah hibah tersebut masih terdapat aset pemerintah kota yang belum dihapus dan terdapat pencanangan terkait adanya perencanaan pemanfaatan lokasi tanah hibah tersebut menjadi garasi (*steiger*) armada milik pemerintah kota dan akan dilakukan pembangunan.

b. Permasalahan Terkait Rumah Negara Eks Pertamina

Dalam proses pengusulan rumah negara eks pertamina sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari pihak Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kekayaan Negara Kementrian Keuangan (DJKN). Dimana dalam hal ini Setditjen telah bersurat secara resmi kepada pihak DJKN dengan nomor: B.1016/PSDKP.1/PL.780/III/2024.

c. Progres Pinjam Pakai Lahan Wilker Berau (Sambaliung)

Terkait progres terbaru permohonan Pinjam Pakai lahan Wilker Berau milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain telah berproses dalam tindak lanjutnya melalui Sekretaris Daerah (Sekda) yang telah diturunkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur..

8. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan Terkait Hibah Lahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pengadaan Masterplan Pos Pengawasan Kotabaru

Terkait langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian masalah proses hibah lahan tersebut masih menunggu tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan oleh Stasiun PSDKP Tarakan kepada

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP).

b. Progres Pinjam Pakai Lahan Wilker Berau (Sambaliung)

Terkait langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian masalah Progres Pinjam Pakai Lahan Wilker Berau (Sambaliung) tersebut masih menunggu tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) kepada pihak Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Penanggungjawab
Kepala Kantor/Kuasa PSDKP



Johanis J. Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002